

Analisis Efektivitas Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) terhadap Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok di Kota Gunungsitoli

Martinus Noverman Harefa[✉], Eliagus Telaumbanua, Palindungan Lahagu, Fatolosa Hulu

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias

e-mail: alexharefa10@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: March 16, 2026

Revised: March 23, 2026

Accepted: March 23, 2026

Published: March 23, 2026

KEYWORDS

effectiveness, SP2KP, price stability, basic commodities, market monitoring

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Basic Needs Market Monitoring System (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok / SP2KP) on the stability of basic commodity prices in the City of Gunungsitoli. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of four purposively selected officials and staff directly involved in the implementation of SP2KP. Data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that SP2KP is fairly effective as an instrument for monitoring prices and the supply of basic commodities, particularly in supporting the identification of price fluctuations, the provision of market information, and policy considerations for local government. However, its effectiveness has not yet been optimal due to factors such as data quality, timeliness of reporting, coordination among actors, limited resources, and technological support. This study concludes that SP2KP makes a tangible contribution to supporting the stability of basic commodity prices in the City of Gunungsitoli, but continuous strengthening is required for it to function more optimally as a regional price control instrument.

©2026 Authors. Published by PT Delada Cahaya Masagro
This work is licensed under an [Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas empat orang yang dipilih secara purposif, yaitu pejabat dan pelaksana yang terlibat langsung dalam implementasi SP2KP. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP2KP cukup efektif sebagai instrumen pemantauan harga dan pasokan kebutuhan pokok, terutama dalam mendukung identifikasi fluktuasi harga, penyediaan informasi pasar, dan dasar pertimbangan kebijakan pemerintah daerah. Namun, efektivitas tersebut belum optimal karena masih dipengaruhi oleh kualitas data, ketepatan waktu pelaporan, koordinasi antaraktor, keterbatasan sumber daya, dan dukungan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SP2KP memiliki kontribusi nyata dalam mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli, tetapi memerlukan penguatan berkelanjutan agar berfungsi lebih optimal sebagai instrumen pengendalian harga di tingkat daerah.

Kata kunci: efektivitas, SP2KP, stabilitas harga, kebutuhan pokok, pemantauan pasar

PENDAHULUAN

Stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan salah satu prasyarat penting bagi terjaganya daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah. Fluktuasi harga pangan yang tajam dapat menekan konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah, karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok cenderung lebih besar. Dalam konteks yang lebih luas, volatilitas harga pangan juga dapat mengganggu kepastian usaha, distribusi, dan respons kebijakan pemerintah daerah terhadap gejolak pasar. Temuan-temuan internasional juga menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan paling berat dirasakan oleh kelompok miskin dan pekerja berupah rendah, sehingga pengendalian harga

kebutuhan pokok menjadi instrumen penting dalam perlindungan kesejahteraan masyarakat (Headey et al., 2024; von Braun & Tadesse, 2012).

Dalam kerangka kebijakan nasional, pengendalian ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Ketentuan ini menempatkan pemantauan harga dan pasokan sebagai bagian penting dari tata kelola perdagangan dalam negeri, khususnya untuk mendukung stabilitas pasar dan perlindungan konsumen.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung fungsi tersebut adalah Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Menurut Kementerian Perdagangan, SP2KP merupakan basis data harga dan stok/pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikumpulkan secara berkelanjutan dan menyeluruh secara nasional. Data ini dimanfaatkan untuk mendukung *early warning* komoditas yang harganya bergejolak, pemetaan wilayah sasaran kebijakan, serta pengukuran lingkup intervensi yang diperlukan. Dengan demikian, SP2KP tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan harga, tetapi juga sebagai instrumen informasi strategis bagi perumusan kebijakan stabilisasi harga.

Secara konseptual, pemantauan atau *monitoring* dipahami sebagai proses pengumpulan dan analisis data secara teratur untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu, memastikan akuntabilitas, serta menyediakan dasar pembelajaran bagi perbaikan kebijakan atau program. World Bank (2013) menekankan bahwa monitoring merupakan fungsi berkelanjutan yang memberikan umpan balik mengenai apa yang berjalan baik, apa yang tidak berjalan baik, dan mengapa hal itu terjadi. Sementara itu, dalam perspektif evaluasi berbasis hasil, efektivitas dipahami sebagai sejauh mana suatu intervensi mencapai tujuan dan hasil yang ditetapkan. Kerangka ini relevan untuk menilai SP2KP, karena efektivitas sistem tidak cukup dilihat dari keberadaan aplikasi semata, tetapi dari kemampuannya mendukung pencapaian tujuan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi sistem informasi harga pangan dapat memperbaiki kualitas pemantauan pasar. Rahman & Wahyuni (2017) mengembangkan desain sistem informasi harga pangan *realtime* sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah dan menunjukkan pentingnya basis data terpusat untuk dokumentasi serta pelaporan harga pangan. Hernawati et al. (2018) juga mengembangkan aplikasi informasi harga kebutuhan pokok masyarakat secara *real time* pada tingkat daerah. Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa sistem berbasis web dapat meningkatkan transparansi pasar, mengurangi keterlambatan pelaporan, dan memperbaiki akurasi data harga.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada perancangan atau pengembangan sistem informasi harga, sedangkan kajian mengenai efektivitas implementasi SP2KP dalam mendukung stabilitas harga di level pemerintah daerah masih relatif terbatas. Di sinilah letak urgensi penelitian ini. Pada konteks Kota Gunungsitoli, SP2KP penting dikaji bukan hanya sebagai aplikasi pemantauan harga, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang keberhasilannya ditentukan oleh kualitas data, konsistensi pelaporan, kapasitas petugas, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, dan kontribusinya terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas SP2KP terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebijakan harga dan ketersediaan barang, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta strategi peningkatan efektivitas sistem pada masa mendatang.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas pada dasarnya merujuk pada tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka evaluasi kebijakan dan program, OECD (2021, 2023) mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana suatu intervensi mencapai, atau diperkirakan akan mencapai, tujuan dan hasilnya. Definisi ini menekankan bahwa penilaian efektivitas tidak hanya melihat keberadaan suatu program atau sistem, tetapi terutama menilai apakah sistem tersebut benar-benar menghasilkan keluaran dan dampak yang diharapkan. Dengan demikian, efektivitas SP2KP dapat dipahami sebagai kemampuan

sistem tersebut dalam menyediakan data harga yang relevan, akurat, tepat waktu, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam penelitian administrasi dan kebijakan publik, efektivitas juga sering dikaitkan dengan hubungan antara tujuan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Suatu sistem dinilai efektif apabila mampu mendukung tujuan organisasi secara nyata, bukan sekadar berjalan secara administratif. Oleh sebab itu, pengukuran efektivitas SP2KP tidak cukup dilihat dari tersedianya aplikasi atau laporan harga, melainkan dari sejauh mana informasi yang dihasilkan dipakai untuk mendeteksi gejolak harga, mendukung respons kebijakan, dan membantu menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemahaman ini sejalan dengan pendekatan evaluasi publik yang menempatkan hasil dan pemanfaatan kebijakan sebagai titik tekan utama (Hinojosa, 2025).

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis data secara berkala terhadap indikator tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu, memastikan akuntabilitas, dan menyediakan dasar pembelajaran bagi perbaikan kebijakan atau program. Bank Dunia menjelaskan bahwa monitoring merupakan fungsi berkelanjutan yang memberi umpan balik kepada manajemen dan pemangku kepentingan tentang apa yang berjalan, apa yang tidak berjalan, serta indikasi awal kemajuan pencapaian tujuan. Dalam konteks pasar kebutuhan pokok, monitoring berarti kegiatan pemantauan harga dan pasokan yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan berbasis data sehingga pemerintah dapat membaca kondisi pasar secara lebih cepat dan tepat (World Bank, 2013).

Sebagai proses manajerial, monitoring menuntut tersedianya indikator yang jelas, prosedur pengumpulan data yang konsisten, kapasitas petugas, dan sistem informasi yang mampu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Karena itu, kualitas monitoring sangat dipengaruhi oleh mutu data, frekuensi pelaporan, dan kemampuan sistem informasi dalam menyajikan hasil pemantauan secara mudah dipahami. Dalam penelitian ini, konsep monitoring relevan untuk menjelaskan bahwa SP2KP bukan hanya alat pencatatan harga, tetapi mekanisme pemantauan berkelanjutan yang seharusnya menghasilkan informasi siap pakai bagi pemerintah daerah (World Bank, 2013).

Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) merupakan platform resmi Kementerian Perdagangan yang memuat data harga dan pasokan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting secara berkelanjutan. Menurut penjelasan resmi SP2KP, data tersebut digunakan untuk mendukung *early warning* terhadap komoditas yang bergejolak, pemetaan wilayah sasaran kebijakan, dan pengukuran lingkup intervensi yang diperlukan. Ini berarti SP2KP memiliki fungsi strategis, bukan sekadar fungsi administratif, karena menjadi salah satu basis informasi bagi pemerintah dalam merumuskan langkah stabilisasi harga.

Dalam perspektif tata kelola perdagangan, keberadaan SP2KP juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah memadai, mutu baik, dan harga terjangkau. Dengan demikian, SP2KP dapat diposisikan sebagai instrumen operasional yang membantu pemerintah daerah menjalankan fungsi pengendalian tersebut melalui penyediaan data pasar yang lebih cepat dan terstruktur. Pada level implementasi, efektivitas SP2KP akan sangat bergantung pada integrasi antara pengumpulan data lapangan, pengolahan informasi, pelaporan berkala, dan pemanfaatan hasilnya dalam kebijakan daerah.

Stabilitas harga merujuk pada kondisi ketika perubahan harga terjadi dalam batas yang wajar dan terkendali, sehingga tidak menimbulkan guncangan besar terhadap daya beli masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Pada komoditas kebutuhan pokok, stabilitas harga sangat penting karena komoditas ini dikonsumsi secara luas dan memiliki bobot besar dalam pengeluaran rumah tangga. Ketika harga pangan berfluktuasi tajam, kelompok rumah tangga miskin dan rentan cenderung menerima dampak paling berat karena mereka mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan pokok (Siregar & Ruslan, 2025).

Dalam konteks kebijakan daerah, stabilitas harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi dan distribusi, tetapi juga oleh kualitas informasi pasar. Informasi harga yang akurat dan cepat memungkinkan pemerintah daerah mendeteksi gejala kenaikan harga lebih dini, membandingkan perkembangan harga antarwilayah, serta menyiapkan langkah intervensi yang lebih tepat. Karena itu, sistem pemantauan harga seperti SP2KP memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas harga: semakin baik sistem memantau, mengolah, dan melaporkan data harga, semakin besar peluang pemerintah melakukan respons kebijakan secara tepat waktu.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem informasi harga pangan berbasis digital dapat memperkuat transparansi pasar dan mendukung pengambilan keputusan. Rahman & Wahyuni (2017) mengembangkan desain sistem informasi harga pangan *realtime* sebagai instrumen kebijakan pengendalian inflasi daerah; studi ini menekankan pentingnya basis data terpusat untuk mendokumentasikan dan menyajikan harga pangan secara cepat kepada pemerintah dan masyarakat. Hernawati et al. (2018) juga mengembangkan aplikasi informasi harga kebutuhan pokok masyarakat secara *real time* untuk mendukung penyediaan informasi harga yang mutakhir di tingkat daerah. Kedua studi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi informasi harga berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan penyajian data.

Studi yang lebih baru juga menegaskan arah yang sama. Penelitian tentang sistem monitoring fluktuasi harga pangan berbasis web menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital dapat membantu pengolahan data harga secara lebih cepat, mendukung pemantauan lintas pasar, dan meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi pemangku kepentingan. Penelitian lain pada 2025 juga menunjukkan bahwa sistem pemantauan harga berbasis web dikembangkan untuk mengatasi keterlambatan dan ketidakakuratan data pada mekanisme konvensional, sekaligus memperbaiki transparansi pasar (Datin et al., 2024; Sari, 2025).

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada perancangan atau pengembangan teknis sistem informasi harga, bukan pada efektivitas implementasi sistem dalam mendukung stabilitas harga di pemerintah daerah. Celah inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya menyoroti keberadaan SP2KP sebagai aplikasi pemantauan, tetapi menilai sejauh mana sistem tersebut efektif digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli dalam mendukung pemantauan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, posisi penelitian ini terletak pada evaluasi implementasi SP2KP dalam konteks kelembagaan daerah (Hernawati et al., 2018; Rahman & Wahyuni, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan dan konteks alamiah penelitian (Creswell & Creswell, 2022; Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis efektivitas Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dalam pemantauan stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut memiliki peran langsung dalam pelaksanaan pemantauan harga kebutuhan pokok dan pengelolaan data pasar melalui SP2KP.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan SP2KP, meliputi Kepala Dinas, Kepala Bidang Perdagangan, Pengawas Perdagangan Ahli Muda, serta Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip, laporan, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang dibantu dengan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan, kendala, dan manfaat SP2KP. Observasi dilakukan untuk memahami konteks pelaksanaan sistem di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014), yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi/reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara berulang dan terus-menerus selama proses penelitian untuk menemukan tema, pola, dan hubungan antartemuan yang relevan dengan efektivitas SP2KP.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Patton, 2015). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar-informan, sedangkan triangulasi teknik

dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar temuan penelitian lebih kredibel.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli, yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 09, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli. Instansi ini merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam urusan perdagangan dan ketenagakerjaan di Kota Gunungsitoli. Dalam konteks penelitian ini, dinas tersebut menjadi lokasi yang relevan karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan pemantauan harga kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Secara kelembagaan, Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli. Melalui perubahan tersebut, urusan perdagangan dan ketenagakerjaan ditempatkan dalam satu perangkat daerah, sehingga fungsi pengawasan pasar, pemantauan harga, pembinaan perdagangan, dan pengelolaan informasi pasar berada dalam koordinasi dinas ini.

Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang yang paling berkaitan dengan penelitian ini adalah Bidang Perdagangan, karena bidang ini menangani pembinaan usaha perdagangan, pengawasan aktivitas pasar, pemantauan harga kebutuhan pokok, serta pelaporan perkembangan harga sebagai dasar pertimbangan kebijakan. Melalui fungsi tersebut, Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli menjadi aktor utama dalam mengoperasikan SP2KP untuk menghimpun data harga dari pasar, memantau fluktuasi harga, dan menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan terkait stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli.

Dari sisi informan, penelitian ini melibatkan empat orang yang dipilih secara purposif karena memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi SP2KP, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Perdagangan, Pengawas Perdagangan Ahli Muda, dan Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar. Keterlibatan keempat informan ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kebijakan, pelaksanaan teknis, pengawasan, serta pengolahan data harga dalam sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli.

Temuan Awal Berdasarkan Informan

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat informan kunci, diperoleh gambaran awal bahwa **SP2KP dipahami sebagai instrumen penting dalam pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli**. Para informan secara umum menempatkan SP2KP tidak hanya sebagai sarana pencatatan data harga, tetapi juga sebagai alat pendukung pemerintah daerah dalam mendeteksi fluktuasi harga, memantau stok barang, serta menyediakan informasi bagi perumusan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam perspektif informan, fungsi SP2KP mencakup aspek pengendalian harga, antisipasi kelangkaan pasokan, perlindungan konsumen, dan dukungan terhadap respons pemerintah dalam situasi pasar yang bergejolak.

Meskipun demikian, para informan juga mengungkapkan bahwa **implementasi SP2KP belum sepenuhnya bebas dari hambatan**. Hambatan yang paling sering muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, kapasitas teknis, maupun dukungan sarana teknologi. Selain itu, pengumpulan dan analisis data pasar dipandang cukup kompleks karena memerlukan ketelitian, kecepatan, dan koordinasi yang konsisten. Beberapa informan juga menekankan bahwa efektivitas SP2KP sangat bergantung pada kualitas data yang masuk, sebab data yang tidak lengkap atau kurang akurat akan berpengaruh langsung terhadap hasil analisis dan ketepatan keputusan yang diambil.

Temuan awal lainnya menunjukkan bahwa **SP2KP dinilai telah membantu pencapaian sebagian besar sasaran pemantauan pasar**, meskipun tingkat keberhasilannya belum sepenuhnya merata. Secara umum, informan menilai sistem ini telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pemantauan harga, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar, keterlibatan para pelaku terkait, dan kemampuan sistem merespons perubahan secara cepat. Dalam hal ini, akurasi data, kualitas analisis, kelengkapan informasi pasar, dan sinergi antaraktor menjadi faktor penting yang menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan SP2KP.

Dari aspek operasional, para informan menegaskan bahwa **ketepatan waktu merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pelaksanaan SP2KP**. Ketepatan waktu tidak hanya terkait dengan kecepatan pengumpulan dan pelaporan data, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membaca gejala pasar secara dini dan merespons perubahan harga secara tepat. Namun, menjaga ketepatan waktu ini bukan hal yang mudah. Tantangan utama yang dihadapi meliputi perubahan harga yang sangat cepat, keterbatasan akses terhadap data pasar yang aktual, serta perlunya penyesuaian yang terus-menerus terhadap kebijakan atau regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, hasil wawancara juga memperlihatkan adanya persepsi bersama bahwa **SP2KP telah berkontribusi terhadap upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli**. Kontribusi tersebut tampak dalam kemampuannya menyediakan informasi harga dan stok secara berkala, mengidentifikasi kecenderungan perubahan harga, serta mendukung pengambilan langkah-langkah antisipatif oleh pemerintah daerah. Sejumlah informan menyebut bahwa dalam beberapa periode, harga komoditas pokok cenderung lebih terkendali, pasokan relatif terjaga, dan pedagang memperoleh informasi yang membantu mereka menyesuaikan praktik penjualan di pasar.

Selain itu, para informan juga menilai bahwa **SP2KP telah menghasilkan perubahan nyata dalam proses evaluasi stabilitas harga**, khususnya melalui peningkatan ketersediaan informasi, transparansi pemantauan, dan dasar pertimbangan bagi intervensi kebijakan. Sistem ini dipandang membantu pemerintah daerah dalam melihat pola perubahan harga, membandingkan kondisi pasar, dan melakukan pengawasan yang lebih terarah. Walaupun demikian, perubahan nyata tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh tantangan internal maupun eksternal, seperti fluktuasi pasokan, variasi musiman, perubahan permintaan, dan kapasitas koordinasi kelembagaan.

Secara keseluruhan, temuan awal ini menunjukkan bahwa **SP2KP di Kota Gunungsitoli telah berfungsi cukup baik sebagai instrumen pemantauan harga kebutuhan pokok**, tetapi efektivitasnya masih bersifat relatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun penghambat. Temuan ini kemudian menjadi dasar bagi proses analisis lebih lanjut melalui tahapan koding dan konstruksi tema untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang membentuk efektivitas SP2KP dalam pemantauan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Proses Koding dan Konstruksi Tema

Analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskrip, dibaca berulang, lalu dikodekan untuk mengidentifikasi pola makna, isu dominan, dan hubungan antarinformasi. Melalui *open coding* ditemukan sejumlah kode awal, seperti fungsi SP2KP, akurasi dan kelengkapan data, ketepatan waktu pelaporan, koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, pemanfaatan teknologi, dan respons terhadap fluktuasi harga. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan melalui *axial coding* ke dalam kategori yang memiliki kedekatan makna, seperti kualitas informasi pasar, ketepatan operasional sistem, dan dukungan implementasi. Selanjutnya, melalui *selective coding*, kategori-kategori tersebut dikonstruksi menjadi lima tema utama, yaitu pemahaman dan fungsi strategis SP2KP, ketepatan sasaran dan kualitas informasi pasar, ketepatan waktu dan respons terhadap fluktuasi harga, kontribusi SP2KP terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok, serta hambatan implementasi dan strategi penguatan sistem.

Berdasarkan proses koding dan pengelompokan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, temuan penelitian dikonstruksi ke dalam beberapa tema utama yang merepresentasikan efektivitas SP2KP terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli. Proses ini menunjukkan bahwa efektivitas SP2KP tidak hanya berkaitan dengan fungsi teknis sistem, tetapi juga dengan kualitas informasi pasar, ketepatan respons terhadap dinamika harga, kontribusinya terhadap stabilitas harga, serta hambatan implementasi yang dihadapi. Ringkasan konstruksi tema temuan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Konstruksi Tema Temuan Penelitian

Tema	Subtema Utama	Aspek Temuan	Informan Kunci	Inti Temuan
------	---------------	--------------	----------------	-------------

Pemahaman dan Fungsi Strategis SP2KP	Pemahaman tujuan SP2KP	Pemahaman terhadap fungsi sistem dalam memantau harga kebutuhan pokok	R1, R2, R3, R4	SP2KP dipahami sebagai instrumen pemantauan harga, pengendalian fluktuasi, perlindungan konsumen, dan dukungan awal bagi respons pemerintah daerah.
Pemahaman dan Fungsi Strategis SP2KP	SP2KP sebagai dasar kebijakan	Pemanfaatan data SP2KP untuk perumusan kebijakan harga dan intervensi pasar	R1, R2	Data SP2KP dipandang penting sebagai dasar analisis dan pertimbangan kebijakan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan barang.
Ketepatan Sasaran dan Kualitas Informasi Pasar	Akurasi dan kelengkapan data	Ketersediaan data pasar yang akurat, lengkap, dan relevan	R1, R2, R3	Efektivitas SP2KP sangat ditentukan oleh mutu data yang dihimpun, karena kualitas data memengaruhi ketepatan analisis dan keputusan.
Ketepatan Sasaran dan Kualitas Informasi Pasar	Keterlibatan pemangku kepentingan	Kerja sama pemerintah, pedagang, distributor, dan pihak terkait dalam pemantauan pasar	R2, R3, R4	Ketepatan sasaran SP2KP dipengaruhi oleh tingkat kolaborasi antaraktor pasar dan lembaga terkait.
Ketepatan Waktu dan Respons terhadap Fluktuasi Harga	Ketepatan waktu pelaporan	Kecepatan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data harga	R1, R2, R4	Ketepatan waktu menjadi unsur penting dalam efektivitas SP2KP karena menentukan kecepatan pemerintah membaca gejala pasar dan merespons perubahan harga.
Ketepatan Waktu dan Respons terhadap Fluktuasi Harga	Respons terhadap dinamika pasar	Kemampuan sistem merespons perubahan harga yang cepat dan tidak terduga	R2, R3, R4	Fluktuasi harga yang cepat, keterbatasan akses data terkini, dan perubahan regulasi menjadi tantangan utama dalam menjaga respons sistem tetap optimal.
Kontribusi SP2KP terhadap Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	Pemantauan stok dan tren harga	Pemanfaatan data stok, pasokan, dan perubahan harga untuk menjaga stabilitas pasar	R1, R2, R4	SP2KP dinilai membantu memantau stok, menganalisis tren harga, dan mendukung langkah antisipatif untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga.
Hambatan Implementasi dan Strategi Penguatan SP2KP	Keterbatasan sumber daya dan penguatan sistem	Dukungan SDM, teknologi, koordinasi, serta evaluasi berkelanjutan	R1, R3, R4	Hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan sumber daya, kompleksitas data, dan koordinasi lintas instansi; penguatan sistem memerlukan evaluasi rutin, integrasi informasi, dan peningkatan kapasitas pelaksana.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa temuan penelitian terkonsentrasi pada lima tema utama yang saling berkaitan dalam menjelaskan efektivitas SP2KP terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli. Tema-tema tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SP2KP tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh pemahaman pelaksana terhadap fungsi sistem, kualitas data yang dihasilkan, ketepatan waktu respons, kontribusinya terhadap pengendalian harga, serta kemampuan institusi dalam mengatasi berbagai hambatan implementasi. Selanjutnya, masing-masing tema tersebut diuraikan lebih lanjut pada bagian penyajian temuan berdasarkan tema.

Penyajian Temuan Berdasarkan Tema

a. Pemahaman dan fungsi strategis SP2KP

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SP2KP dipahami oleh para informan sebagai instrumen yang memiliki fungsi strategis dalam pemantauan harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli. Sistem ini tidak hanya diposisikan sebagai sarana pencatatan data harga, tetapi juga sebagai perangkat yang membantu pemerintah daerah dalam mendeteksi fluktuasi harga, memantau ketersediaan stok, melindungi konsumen, dan mendukung perumusan kebijakan harga. Para informan menekankan bahwa keberadaan SP2KP memberi dasar informasi bagi pemerintah untuk merespons gejolak pasar secara lebih terarah. Hal ini tampak dari pernyataan informan yang menegaskan bahwa SP2KP membantu pemerintah memantau dan mengendalikan fluktuasi harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat, menyediakan data akurat untuk perumusan kebijakan, serta mendukung perlindungan konsumen dari praktik pasar yang merugikan ([R1, 27 Maret 2024]; [R2, 27 Maret 2024]; [R3, 27 Maret 2024]). Dengan demikian, dalam pandangan informan, SP2KP memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar sistem teknis, yakni sebagai instrumen strategis dalam tata kelola stabilitas harga.

b. Ketepatan sasaran dan kualitas informasi pasar

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas SP2KP sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran dan kualitas informasi pasar yang dihasilkan. Dalam hal ini, akurasi, kelengkapan, dan relevansi data menjadi unsur penting karena menentukan ketepatan analisis dan kebijakan yang diambil. Informan menilai bahwa sistem akan sulit mencapai sasaran apabila data yang masuk tidak lengkap atau tidak akurat. Selain itu, ketepatan sasaran juga dipengaruhi oleh keterlibatan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pedagang, distributor, dan pelaku pasar lainnya, dalam menyediakan dan memanfaatkan data pasar secara tepat. Hal ini terlihat dari penjelasan informan yang menekankan pentingnya keakuratan dan kelengkapan data, kualitas analisis pasar, serta kerja sama antaraktor untuk menghasilkan pemantauan yang lebih tepat sasaran ([R1, 16 April 2024]; [R2, 16 April 2024]; [R3, 16 April 2024]; [R4, 16 April 2024]). Dengan demikian, ketepatan sasaran SP2KP tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada kualitas informasi yang dihimpun dan dikelola dalam sistem.

c. Ketepatan waktu dan respons terhadap fluktuasi harga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu merupakan dimensi penting dalam efektivitas SP2KP, terutama dalam konteks pasar kebutuhan pokok yang sangat dinamis. Ketepatan waktu tidak hanya berkaitan dengan kecepatan pengumpulan dan pelaporan data, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem dan pelaksana untuk membaca gejala perubahan harga secara dini. Para informan menegaskan bahwa sistem informasi yang terintegrasi, kolaborasi dengan pelaku pasar, dan pemantauan rutin merupakan langkah yang mendukung ketepatan waktu respons. Namun demikian, mereka juga mengakui adanya tantangan berupa fluktuasi harga yang cepat, keterbatasan data terkini, dan perubahan regulasi yang dapat menghambat respons sistem. Temuan ini tercermin dalam pernyataan informan yang menyoroti pentingnya sistem informasi pasar terpadu, kolaborasi untuk memperoleh informasi *real-time*, serta kendala akibat perubahan harga yang tidak terduga ([R1, 19 April 2024]; [R2, 19 April 2024]; [R3, 19 April 2024]; [R4, 19 April 2024]). Dengan demikian, efektivitas SP2KP dalam menjaga stabilitas harga sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan respons terhadap dinamika pasar.

d. Kontribusi SP2KP terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SP2KP dipersepsikan telah memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli. Kontribusi tersebut tampak dalam kemampuannya membantu pemantauan stok dan pasokan, menganalisis perubahan harga secara berkala, serta mendukung langkah antisipatif pemerintah dalam mencegah kelangkaan dan lonjakan harga. Beberapa informan juga menyampaikan bahwa terdapat indikasi harga beberapa komoditas pokok cenderung relatif stabil dalam periode tertentu, dan pasokan di pasar lokal dinilai lebih terjaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa SP2KP berfungsi sebagai sumber informasi yang membantu pemerintah membaca tren pasar dan mengambil langkah pengendalian yang lebih tepat. Hal ini tampak dari keterangan informan mengenai pemantauan stok, analisis harga berkala, serta indikasi stabilitas harga komoditas pokok dalam beberapa bulan terakhir ([R1, 23 April 2024]; [R2, 23 April 2024]; [R3, 23 April 2024]; [R4, 23 April 2024]). Dengan demikian, SP2KP dinilai memiliki kontribusi nyata dalam mendukung stabilitas harga, meskipun hasilnya masih dipengaruhi oleh kondisi pasar yang berubah-ubah.

e. Hambatan implementasi dan strategi penguatan SP2KP

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi SP2KP masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Hambatan utama yang diungkapkan informan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kompleksitas pengumpulan dan analisis data, kendala teknologi, serta koordinasi lintas instansi yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, dinamika pasar, perubahan regulasi, dan ketidakstabilan pasokan juga menjadi faktor eksternal yang mempersulit pelaksanaan sistem. Meskipun demikian, informan juga mengemukakan sejumlah strategi penguatan, seperti pemantauan dan evaluasi rutin, penguatan integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas pelaksana, serta kolaborasi yang lebih intensif dengan pelaku pasar dan pihak terkait lainnya. Temuan ini terlihat dari pernyataan informan yang menekankan keterbatasan sumber daya, tantangan koordinasi antarinstansi, serta pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan SP2KP berjalan lebih efektif ([R1, 27 Maret 2024]; [R3, 27 Maret 2024]; [R3, 19 April 2024]; [R4, 19 April 2024]). Dengan demikian, efektivitas SP2KP pada masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk mengatasi hambatan implementasi dan memperkuat sistem secara berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SP2KP di Kota Gunungsitoli dipahami bukan sekadar sebagai aplikasi pencatatan harga, melainkan sebagai instrumen yang mendukung pemantauan pasar, pembacaan gejala perubahan harga, dan pertimbangan kebijakan daerah. Dalam perspektif evaluasi kebijakan, efektivitas suatu program atau sistem tidak cukup dilihat dari keberadaannya, tetapi dari kemampuannya menghasilkan fungsi dan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Vedung (2017) menempatkan evaluasi kebijakan sebagai upaya menilai keberhargaan program publik untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan, sedangkan Sylvia & Sylvia (2012) menekankan bahwa evaluasi program sektor publik harus memperhatikan keterhubungan antara tujuan, proses, dan hasil program. Dengan demikian, temuan bahwa SP2KP dimanfaatkan untuk memantau harga, membaca kondisi pasar, dan mendukung langkah antisipatif pemerintah menunjukkan bahwa sistem ini telah menjalankan fungsi publik yang relevan dengan tujuan stabilisasi harga.

Dari sudut pandang efektivitas, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa SP2KP dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum optimal. Penilaian ini penting karena efektivitas dalam evaluasi publik pada dasarnya merujuk pada tingkat ketercapaian tujuan dan hasil intervensi. OECD mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana suatu intervensi mencapai atau diperkirakan akan mencapai tujuan dan hasilnya. Jika dikaitkan dengan temuan lapangan, SP2KP telah membantu penyediaan informasi harga dan pasokan, tetapi manfaat tersebut masih dipengaruhi oleh kualitas data, kecepatan respons, dan kapasitas implementasi di tingkat daerah. Artinya, efektivitas SP2KP dalam penelitian ini tidak bersifat absolut, melainkan bertingkat: sistem bekerja dan memberi manfaat, tetapi hasilnya belum sepenuhnya stabil dan merata pada seluruh aspek pemantauan harga (Vedung, 2017). Temuan penelitian juga menegaskan bahwa kualitas informasi pasar merupakan inti dari efektivitas SP2KP. Informan berulang kali menekankan pentingnya akurasi, kelengkapan, dan ketepatan analisis data. Hal ini sejalan dengan literatur metodologi kualitatif dan evaluasi yang menekankan pentingnya proses reduksi, pengorganisasian, dan penafsiran data secara cermat untuk menghasilkan makna yang valid. Miles et al. (2014) menegaskan bahwa analisis data kualitatif yang baik bergantung pada proses pengodean, pengelompokan, dan penarikan makna yang sistematis, sedangkan dalam konteks monitoring-evaluation, World Bank menekankan bahwa data yang andal dan pelaporan yang baik merupakan prasyarat untuk tindakan korektif yang tepat. Karena itu, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa akurasi dan kelengkapan data dalam SP2KP tidak dapat dianggap sebagai unsur teknis biasa, tetapi sebagai fondasi utama yang menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Pada aspek **ketepatan sasaran**, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas SP2KP juga ditentukan oleh keterlibatan aktor-aktor pasar dan lembaga terkait. Temuan ini dapat dijelaskan melalui pandangan monitoring sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan aliran informasi dari berbagai sumber agar pengambilan keputusan tetap relevan dengan kondisi lapangan. Dalam penelitian ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, pedagang, distributor, dan pihak terkait berperan dalam menyediakan informasi pasar yang lebih akurat dan aktual. Dengan kata lain, ketepatan sasaran SP2KP bukan hanya ditentukan oleh desain sistem, tetapi juga oleh jejaring kelembagaan yang menopang

pengumpulan dan penggunaan data. Temuan ini sejalan dengan studi Issifu & Agyapong (2023) yang menemukan bahwa praktik monitoring dan evaluasi berpengaruh positif terhadap hasil program, karena kualitas praktik monitoring memengaruhi kualitas hasil yang dicapai.

Aspek **ketepatan waktu** menjadi dimensi lain yang sangat menonjol. Informan menegaskan bahwa data harga yang cepat dihimpun dan dilaporkan akan memperkuat kemampuan pemerintah membaca fluktuasi pasar lebih dini. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahman & Wahyuni (2017) yang menegaskan pentingnya sistem informasi harga pangan *realtime* sebagai instrumen kebijakan pengendalian inflasi daerah. Studi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi harga diperlukan agar pemerintah dan masyarakat memperoleh rujukan harga yang cepat dan mudah diakses. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan studi Hernawati et al. (2018) yang menunjukkan bahwa aplikasi informasi harga kebutuhan pokok secara *real time* dapat membantu penyediaan informasi yang mutakhir kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, ketepatan waktu dalam penelitian ini tidak hanya bermakna administratif, tetapi menjadi syarat substantif bagi efektivitas SP2KP.

Selanjutnya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa SP2KP berkontribusi terhadap **stabilitas harga kebutuhan pokok**, terutama melalui pemantauan stok, pembacaan tren harga, dan penyediaan dasar informasi untuk langkah antisipatif. Namun, kontribusi ini perlu dipahami secara proporsional. SP2KP tidak secara langsung “menentukan” stabilitas harga, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk membaca pasar dan merespons perubahan secara lebih tepat. Temuan ini didukung oleh studi Olabisi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa data harga pangan frekuensi tinggi meningkatkan kapasitas deteksi dini gangguan pasar dan menyediakan bukti yang cepat bagi penilaian risiko pangan. Dalam konteks ini, SP2KP berfungsi sebagai sistem informasi yang memperbaiki kualitas respons, bukan sebagai satu-satunya penentu stabilitas harga, karena harga kebutuhan pokok tetap dipengaruhi oleh pasokan, distribusi, musim, dan perubahan permintaan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, studi ini menunjukkan kontribusi yang berbeda. Penelitian Rahman & Wahyuni (2017) lebih menitikberatkan pada **perancangan sistem informasi harga pangan realtime**, sedangkan penelitian Hernawati dkk. berfokus pada **pengembangan aplikasi informasi harga kebutuhan pokok masyarakat**. Keduanya penting untuk menegaskan manfaat digitalisasi informasi harga, tetapi belum secara langsung menilai bagaimana sistem itu bekerja dalam praktik birokrasi daerah. Dalam hal ini, penelitian tentang SP2KP di Kota Gunungsitoli memperluas diskusi dari persoalan desain teknis menuju persoalan **efektivitas implementasi**: bagaimana sistem dipahami, bagaimana data dihimpun, kendala apa yang dihadapi, dan sejauh mana sistem memberi kontribusi pada stabilitas harga. Posisi ini memberi nilai tambah karena menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi publik tidak hanya ditentukan oleh rancangan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan proses penggunaan data dalam kebijakan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan implementasi masih cukup kuat, terutama pada keterbatasan sumber daya, pengelolaan data, dukungan teknologi, dan koordinasi lintas instansi. Temuan ini selaras dengan pendekatan evaluasi program sektor publik yang menegaskan bahwa hasil program sangat dipengaruhi oleh kualitas proses implementasi. Sylvia & Sylvia (2012) menekankan pentingnya evaluasi proses untuk menilai sejauh mana suatu program benar-benar berjalan sebagaimana direncanakan, sementara Vedung melihat evaluasi sebagai instrumen perbaikan kebijakan yang justru penting ketika ditemukan kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas implementasi. Dengan demikian, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak sekadar menunjukkan kelemahan pelaksanaan, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan penguatan sistem, baik melalui peningkatan kapasitas SDM, integrasi data, maupun koordinasi kelembagaan yang lebih baik.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat ditegaskan bahwa SP2KP di Kota Gunungsitoli telah menjalankan fungsi yang berarti dalam pemantauan harga kebutuhan pokok, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan agar hasilnya lebih optimal. Temuan ini mendukung pandangan Creswell dan Creswell bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami makna suatu fenomena dari perspektif partisipan dalam konteksnya, dan dalam penelitian ini makna tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SP2KP terbentuk dari interaksi antara tujuan sistem, kualitas data, kecepatan respons, dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan SP2KP ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas informasi pasar, evaluasi berkelanjutan, penguatan teknologi dan SDM, serta kolaborasi yang lebih

intensif dengan para pelaku pasar agar sistem ini benar-benar mampu menopang stabilitas harga kebutuhan pokok secara lebih konsisten.

Implikasi Temuan Penelitian

Pertama, menstandarkan ROP di gudang (kanban/tanda fisik pada ~59 kg) dan disiplinkan audit Penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, temuan penelitian memperkuat pandangan bahwa efektivitas sistem informasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem secara teknis, tetapi juga oleh kualitas data, ketepatan waktu informasi, kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan hasil sistem dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, SP2KP terbukti tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen digital pemantauan harga, tetapi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola pasar yang memerlukan dukungan organisasi dan koordinasi antarpihak agar dapat berfungsi secara optimal.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan efektivitas SP2KP di Kota Gunungsitoli perlu diarahkan pada beberapa aspek utama. Pertama, peningkatan kualitas data harga dan pasokan harus menjadi prioritas agar analisis yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana perlu dilakukan agar pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data dapat berjalan lebih efektif. Ketiga, integrasi sistem informasi dan penguatan koordinasi dengan pelaku pasar serta instansi terkait perlu ditingkatkan untuk mempercepat aliran informasi dan respons terhadap dinamika harga. Keempat, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SP2KP penting dilakukan agar sistem ini tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat daerah.

Selain itu, penelitian ini juga memberi implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memandang SP2KP sebagai instrumen *early warning* yang memerlukan tindak lanjut nyata dalam bentuk langkah antisipatif, pengawasan pasar, dan koordinasi distribusi. Dengan demikian, efektivitas SP2KP akan lebih kuat apabila didukung oleh komitmen kelembagaan dan kebijakan yang responsif terhadap informasi yang dihasilkan sistem.

Keterbatasan penelitian & Arah Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu instansi, yaitu Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli, sehingga temuan lebih mencerminkan konteks lokal. Kedua, informan penelitian terbatas pada unsur internal instansi, sehingga perspektif pedagang, distributor, produsen, dan konsumen belum tergali secara mendalam. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga kontribusi SP2KP terhadap stabilitas harga lebih dipahami berdasarkan temuan lapangan dan persepsi informan, belum melalui pengukuran kuantitatif yang lebih rinci.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan informan yang lebih beragam, mencakup pelaku pasar dan masyarakat pengguna informasi harga, serta menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar dapat menggabungkan kedalaman analisis kualitatif dengan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan harga dan efektivitas sistem. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat dilakukan secara komparatif antarwilayah atau longitudinal agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai efektivitas SP2KP dalam mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa **Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)** di Kota Gunungsitoli telah berfungsi sebagai instrumen penting dalam pemantauan harga kebutuhan pokok dan cukup efektif dalam mendukung upaya menjaga stabilitas harga. Efektivitas tersebut tampak pada peran SP2KP dalam menyediakan informasi harga dan pasokan, mendukung identifikasi fluktuasi pasar, serta menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merespons dinamika harga kebutuhan pokok.

Namun demikian, efektivitas SP2KP belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas data, ketepatan waktu pelaporan, koordinasi antaraktor, ketersediaan sumber daya, dan dukungan teknologi merupakan faktor-faktor yang sangat memengaruhi kinerja sistem. Dengan demikian, efektivitas SP2KP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem itu sendiri, tetapi juga oleh

kapasitas kelembagaan dalam mengelola, memanfaatkan, dan menindaklanjuti informasi yang dihasilkan. Secara keseluruhan, SP2KP memiliki kontribusi nyata dalam mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Gunungsitoli, tetapi penguatan pada aspek kualitas data, kapasitas pelaksana, integrasi informasi, dan evaluasi berkelanjutan masih diperlukan agar sistem ini dapat berfungsi lebih optimal sebagai instrumen pengendalian harga di tingkat daerah.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Headey, D., Bachewe, F., Marshall, Q., Raghunathan, K., & Mahrt, K. (2024). Food prices and the wages of the poor: A cost-effective addition to high-frequency food security monitoring. *Food Policy*, 125, 102630. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2024.102630>
- Hernawati, E., Rosely, E., & Handini, R. W. (2018). Aplikasi Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Real Time. *Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (JUSTIN)*, 6(4), 193. <https://doi.org/10.26418/justin.v6i4.29118>
- Hinojosa, C. (2025). *Implementation Toolkit Public Policy Evaluation*.
- Issifu, R., & Agyapong, D. (2023). Monitoring and evaluation practices and project outcome of tech start-ups in Ghana: The moderating role of the Business environment. *Cogent Business & Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2279793>
- Maha Valne Datin, Suendri, & Fathiya Hasyifah Sibarani. (2024). Sistem Informasi Komoditas Harga Pangan Menggunakan Algoritma Sequential Search Berbasis Web pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. *INFORMASI (Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi)*, 16(1), 32–45. <https://doi.org/10.37424/informasi.v16i1.289>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2021). *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/543e84ed-en>
- OECD. (2023). *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-based Management in Sustainable Development* (2nd ed.). OECD. <https://doi.org/10.1787/632da462-en-fr-es>
- Olabisi, M., Adeyemi, U., Maredia, M. K., Ajibade, T., & Ajeigbe, H. (2025). High frequency phone surveys for tracking food prices: Evidence from the KasuwaGo project. *Global Food Security*, 45, 100863. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2025.100863>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Rahman, R., & Wahyuni, S. (2017). Desain Sistem Informasi Harga Pangan Realtime Sebagai Instrumen Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah. *Jurnal Insipro (Information System and Processing)*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/insipro.v2i2.4067>
- Sari, D. M. (2025). Monitoring Sistem Fluktuasi Harga Pangan Secara Realtime Berbasis Website. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 12(1). <https://doi.org/10.35957/jatisi.v12i1.9388>
- Siregar, R. H., & Ruslan, D. (2025). Evaluation of Food Price Stabilization Policy on Consumer Purchasing Ability (Case Study of MMTC Medan Raya Market). *PRIMANOMICS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Alfabeta.
- Sylvia, R. D., & Sylvia, K. M. (2012). *Program Planning and Evaluation for the Public Manager* (4th ed.). Waveland Press.
- Vedung, E. (2017). *Public Policy and Program Evaluation*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315127767>
- von Braun, J., & Tadesse, G. (2012). *Global Food Price Volatility and Spikes: An Overview of Costs, Causes, and Solutions* (161).
- World Bank. (2013). *Design & implementation: Monitoring and evaluation*. World Bank.